

Determinan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa

Syadza Azalia Renanda¹, Robinson²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu
azaliasyadza@gmail.com¹, robin76kph@gmail.com²

ABSTRACT.

This research aims to examine the effect of variable suitability of compensation, internal control systems, morality, and competence of personnel for the prevention of fraud in village funds management. The study utilizes a questionnaire to collect data from 33 villages in Mukomuko Regency, with each village involving the head of financial staff, resulting in a total sample of 33 people. Data analysis is conducted using multiple linear regression. The result showed that the competence of personnel has a significant partial effect on fraud prevention in village funds management. However, suitability of compensation does not have a significant partial effect on the prevention of fraud in village funds management, internal control systems do not have a significant partial effect on the prevention of fraud in village funds management, and morality does not have a significant partial effect on prevention of fraud in village funds management. Nevertheless, the suitability of compensation, internal control systems, morality, and competence of personnel collectively have simultaneous effects on the prevention of fraud in village funds management. The magnitude of the effect was 61,9% while the rest (31,8%) was effected by other variables that were not studied in this research.

Keywords: *Suitability of Compensation; Internal Control Systems; Morality; Competence Of Personnel; Prevention of Fraud; Village Funds Management*

ABSTRAK.

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, moralitas dan kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari 33 desa di Kabupaten Mukomuko, dengan masing-masing desa melibatkan kepala urusan keuangan, sehingga total sampel mencapai 33 orang. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, kesesuaian kompensasi tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dan moralitas tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun, kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, moralitas dan kompetensi aparatur secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Besarnya pengaruh tersebut adalah 61,9%, sementara sisanya (31,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: *Kesesuaian Kompensasi; Sistem Pengendalian Internal; Moralitas; Kompetensi Aparatur; Pencegahan Kecurangan; Pengelolaan Dana Desa*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan internalnya sendiri dengan harapan dapat mengembangkan diri secara mandiri, mencapai kemajuan, dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks otonomi daerah, pemberian Dana Desa oleh Pemerintah Pusat dianggap sebagai upaya signifikan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meratakan pendapatan (Baihaqi, et al. 2019). Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa keberadaan Dana Desa juga membawa potensi risiko *fraud*, terutama seiring dengan peningkatan alokasi dana yang signifikan untuk desa. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan dana yang memerlukan perhatian serius dalam upaya menjaga integritas dan efektivitas program pengembangan desa.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), salah satu organisasi di Amerika Serikat yang berfokus utama pada pencegahan dan pemusnahan penipuan, mengkategorikan penipuan menjadi tiga kelompok, yaitu, penipuan laporan keuangan, penyelewengan aset, dan korupsi. Data yang diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa kasus tindak pidana korupsi di tingkat desa mengalami peningkatan yang signifikan dalam periode 2015-2018. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), masalah utama yang mendasar terkait korupsi di desa adalah kurangnya penerapan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan anggaran desa, meskipun jumlah anggarannya besar. (Indonesia Corruption Watch, 2018).

Potensi *fraud* juga merupakan masalah yang mendapat sorotan di Provinsi Bengkulu. Dengan sejumlah kasus *fraud* yang telah terjadi, beberapa masalah tercatat di Kabupaten Mukomuko. Masalah yang terkait dengan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Mukomuko, yang telah diberitakan dalam media massa secara daring yaitu dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Pasar Ipuh pada tahun 2021 (Antara News 2022). Pada tahun yang sama juga terdapat kasus penyelewengan penggunaan dana desa di Desa Air Kasai (Antara News, 2022). Selain itu, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) (Rakyat Bengkulu, 2022) dan sejumlah desa tidak setor pajak penggunaan dana desa pada tahun 2022 (Radar Bengkulu, 2022). Adapun kasus terbaru pada tahun 2023 yaitu kasus korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh pendamping sosial Desa Agung Jaya dan pendamping social Desa Mekar Jaya (Antara News, 2023).

Untuk mengatasi lonjakan kasus penyelewengan terkait Dana Desa, strategi pencegahan telah dirancang, termasuk penandatanganan pakta integritas anti korupsi dalam program "Jaga Desa Bersama" di Kabupaten Mukomuko, melibatkan kepala desa dan kaur keuangan desa serta Kejaksaan Negeri Mukomuko. Bimbingan teknis juga diadakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu terkait Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan desa, yang berperan penting dalam pengelolaan dana desa dan pencegahan kecurangan. Pemerintah Kabupaten Mukomuko juga melakukan langkah lain dalam pencegahan fraud, yaitu melibatkan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dirancang oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pemantauan serta koordinasi dan supervisi dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya terkait tata kelola dana desa.

Metode pencegahan adalah pendekatan yang utama dan paling tepat untuk pemerintahan desa saat ini, sehingga penyelewengan tidak dapat tumbuh dan menjadi masalah yang meluas dalam pemerintah desa. Mengeluarkan dana untuk langkah-langkah pencegahan kecurangan jauh lebih efektif secara biaya daripada menghabiskan anggaran untuk mendeteksi dan menanggulangi kecurangan. Memahami motif pelaku, mengidentifikasi potensi pelaku, dan menentukan objek penyelewengan diharapkan akan membantu dalam upaya pencegahan penyelewengan dalam pemerintahan desa. Dengan ini, analisis teori kecurangan digunakan untuk menganalisis kemungkinan siapa yang akan menjadi pelaku kecurangan dalam pemerintahan desa, mengapa mereka melakukan kecurangan dan bagaimana mencegah kecurangan dalam pemerintahan desa (Puspasari, 2017).

Wolfe & Dana (2004) mengusulkan konsep *Fraud Diamond Theory* sebagai penyempurnaan dari konsep *Fraud Triangle Theory* yang pertama kali diajukan oleh Cressey pada tahun 1953. Selain unsur-unsur seperti rasionalisasi, tekanan, dan peluang, dalam teori ini juga memasukkan elemen keempat, yaitu kemampuan individu (*individual's capability*). Kemampuan seseorang mencakup kemampuan untuk mengenali kelemahan dalam sistem pengendalian internal, memiliki posisi dan wewenang, dan mampu meyakinkan orang lain dengan menggunakan kebohongan. Semua ini dapat dieksploitasi untuk melakukan tindakan kecurangan, sehingga dalam penelitian ini memproksikan variabel independen dengan menggunakan kerangka *Fraud Diamond Theory*, di mana *pressure* diproksikan dengan variabel kesesuaian kompensasi, *opportunity* diproksikan dengan variabel sistem pengendalian internal, *rationalization* diproksikan dengan variabel moralitas, dan *capability* diproksikan dengan variabel kompetensi aparatur.

Selain data dari ICW yang menunjukkan kasus *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Indonesia, begitu juga beberapa kasus *fraud* yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Provinsi Bengkulu terutama di Kabupaten Mukomuko menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa diatur oleh undang-undang dan dikelola

secara mandiri oleh desa, potensi risiko *fraud* masih sangat signifikan. Hal ini menciptakan sebuah fenomena yang memerlukan analisis lebih mendalam tentang pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap temuan gap dalam penelitian sebelumnya serta fenomena kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Tujuan utama penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada pencegahan kecurangan, seperti penyesuaian kompensasi, perbaikan sistem pengendalian internal, moralitas, dan peningkatan kompetensi aparatur desa. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dengan memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah desa dalam upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif. Selain itu, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian survei. Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada Pemerintah Desa di Kabupaten Mukomuko. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yaitu kesesuaian kompensasi, moralitas, sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kaur keuangan yang berasal dari 148 desa dari 14 kecamatan di Kabupaten Mukomuko. Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa mereka yang menduduki posisi tersebut memiliki potensi untuk terlibat dalam tindakan penipuan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan metode *cluster sampling*. *Cluster* merujuk pada pengelompokan berdasarkan area geografis atau lokasi populasi. Pendekatan ini dipilih oleh peneliti sebagai respons terhadap kendala-kendala seperti keterbatasan waktu, anggaran, dan jarak geografis sehingga dari jumlah populasi tersebut ditetapkan 36 kepala urusan keuangan sebagai responden yang berasal dari 36 desa dari 5 kecamatan daerah penyangga yang berbatasan dengan kota dan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, yakni:

Tabel 1 Sampel Penelitian

| No | Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Kaur Keuangan |
|----|---------------|-------------|----------------------|
| 1 | Kota Mukomuko | 6 desa | 6 Kaur Keuangan |
| 2 | Air Dikit | 7 desa | 7 Kaur Keuangan |
| 3 | XIV Koto | 8 desa | 8 Kaur Keuangan |
| 4 | Lubuk Pinang | 7 desa | 7 Kaur Keuangan |
| 5 | Air Manjuntjo | 8 desa | 8 Kaur Keuangan |
| | Total | 36 desa | 36 Kaur Keuangan |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mukomuko (<https://mukomukokab.bps.go.id>) (2018), diakses Oktober 2023

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang berarti informasi ini diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melibatkan perantara. Data primer yang digunakan mencakup tanggapan responden melalui kuesioner dengan skala likert mengenai variabel independen dan dependen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan distribusi kuesioner yang berisikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk mengevaluasi pengaruh kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, moralitas, dan kompetensi aparatur terhadap pencegahan penipuan dalam pengelolaan dana desa. Kuesioner diisi oleh kepala urusan keuangan di setiap desa.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan adalah regresi linier berganda yang dievaluasi dengan menggunakan data dari kuesioner yang menggunakan skala likert 5 poin. Untuk pengolahan data, peneliti memanfaatkan perangkat lunak *Statistical Package for Social Science* (SPSS) 29. Beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas), dan uji hipotesis (uji t, koefisien determinasi (R^2) dan uji F).

Definisi Operasional dan Hipotesis Penelitian

Kesesuaian Kompensasi

Tekanan untuk terlibat dalam kecurangan di desa seringkali muncul karena sebagian besar penduduk desa, termasuk pejabat desa, mengalami kondisi kekurangan. Selain itu, ada tekanan finansial tambahan yang timbul karena praktik pengembalian dana selama Pemilihan Kepala Desa (Puspasari, 2017). Memberikan kompensasi yang sesuai kepada aparatur desa dianggap sebagai tindakan yang efektif dalam mencegah penipuan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2020) di Kabupaten Banjar, terkait dengan variabel kesesuaian kompensasi, menunjukkan dampak positif dan signifikan pada upaya pencegahan penipuan dalam pengelolaan dana desa (Rahmawati et al, 2020). Namun, penelitian oleh Irwansyah & Syufriadi (2019) menunjukkan hasil yang berbeda, kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ini menunjukkan bahwa memberikan kompensasi yang memadai oleh perusahaan (desa) tidak dapat dijamin dapat mengurangi tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh karyawan (aparatur) (Irwansyah & Syufriadi, 2019). Berdasarkan landasan konseptual yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang terdapat dalam sebuah organisasi (Fachruzzaman, et al. 2021). Struktur pengendalian yang lemah akan meningkatkan risiko terjadinya kecurangan (Halimatusyadiah & Nugraha, 2019). Langkah awal dalam upaya pencegahan kecurangan adalah melaksanakan sistem pengendalian internal yang efektif. Kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan semakin terbuka karena sistem pengendalian internal di desa masih belum memadai. Kondisi ini mengakibatkan kerentanan yang lebih tinggi terhadap potensi tindakan kecurangan di tingkat desa. Menurut Natalia & Coryanata (2019), pengaruh pengendalian internal berdampak negatif pada kecenderungan penipuan, mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas pengendalian internal yang lebih tinggi akan mengurangi dan menghindari kecenderungan penipuan. Meskipun demikian, temuan ini berlawanan dengan penelitian Huljanah (2019), Yang tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan landasan konseptual yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

Moralitas

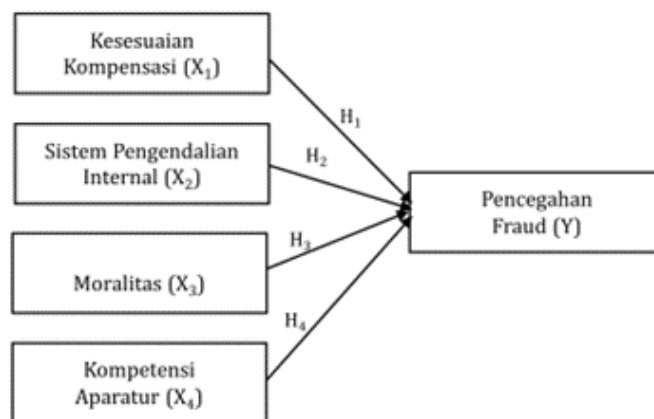
Rasionalisasi (*rationalization*) dapat memicu tindakan kecurangan ketika pelaku mencari alasan atau pembenaran untuk tindakan yang merugikan (Molida & Chairi, 2011). Untuk itu, individu harus memiliki moralitas yang tinggi. Individu dengan moralitas tinggi patuh pada aturan berdasarkan prinsip etika universal dan cenderung menghindari kecurangan. Dengan nilai etis yang tinggi, individu tersebut akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab yang telah diberikan (Halimatusyadiah & Robani, 2021). Sebaliknya, mereka yang memiliki tingkat moralitas rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan keinginan pribadi mereka dan tidak mematuhi peraturan serta kewajiban yang seharusnya diikuti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahimah et al. (2018), dapat disimpulkan bahwa moralitas aparat memiliki dampak sebagian pada pencegahan penipuan. Meskipun demikian, temuan ini tidak selalu konsisten, sebab penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2017) mengindikasikan bahwa moralitas tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan penipuan (Dewi et al., 2017). Berdasarkan landasan konseptual yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Kompetensi Aparatur

Kompetensi dapat dijelaskan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan, yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan. Menurut *Fraud Diamond Theory*, dimana *capability* atau kapabilitas adalah kemampuan yang berkaitan dengan posisi, kecerdasan atau kreativitas, dan kemampuan persuasi. Ketiga elemen ini sangat menentukan mampu tidaknya seseorang melakukan tindakan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur memiliki dampak yang signifikan pada usaha pencegahan penipuan. Dengan kata lain, peningkatan tingkat kompetensi pada aparatur pemerintah dapat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan berpotensi mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Rosalina (2020) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu kompetensi aparatur tidak memengaruhi usaha pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan landasan konseptual yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini melibatkan seluruh kaur keuangan yang berasal dari 148 desa di 14 kecamatan di Kabupaten Mukomuko sebagai populasi, dengan memilih 36 kaur keuangan yang tersebar merata pada 36 desa di 5 kecamatan sebagai sampel.

Sebanyak 36 kuesioner telah didistribusikan, kuesioner yang dikembalikan sebanyak 33 buah (91,67%) dan memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut.

Karakteristik Responden

Pada penelitian ini, data karakteristik responden telah disusun berdasarkan beberapa kriteria, seperti jabatan, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja. Dari total 33 responden yang diklasifikasikan berdasarkan jabatan, seluruhnya (100%) merupakan Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan). Dalam hal jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan dengan persentase sebanyak 67%, sementara laki-laki hanya 33%. Adapun distribusi responden berdasarkan usia terbagi menjadi empat kategori, yakni usia >25 tahun sebanyak 12%, mayoritas (67%) berada pada rentang usia 25-35 tahun, usia 36-45 tahun sebanyak 18%, dan usia > 45 tahun sebanyak 3%. Dengan ini dapat diketahui bahwa sebagian besar Kepala Urusan Keuangan berusia 25-35 tahun, mencapai 67% dari total responden (22 orang), menandakan bahwa usia tersebut merupakan masa produktif untuk bekerja.

Berikutnya, responden dibagi berdasarkan tingkat Pendidikan SMA sebanyak 33%, D3 sebanyak 6%, S1 sebanyak 58%, dan S2 sebanyak 2%. Masa kerja <2 tahun sebanyak 24%, masa kerja 2 – 5 tahun sebanyak 43%, masa kerja 6 – 9 tahun sebanyak 24% dan masa kerja > 10 tahun sebanyak 3%. Dari data tersebut, sebagian besar tingkat pendidikan kaur keuangan adalah S1 sebanyak 58% atau 19 responden dan didominasi oleh kaur keuangan yang memiliki masa kerja 2 – 5 tahun yaitu sebanyak 16 responden, dikarenakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Mukomuko baru diselenggarakan pada tahun 2021 yang lalu, banyak desa yang melakukan seleksi untuk merekrut aparatur desa yang baru.

Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2019) yang dimaksud statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, minimum, standar deviasi (Ghozali, 2019). Hasil uji deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--|----|---------|---------|-------|----------------|
| Kesesuaian Kompensasi (X_1) | 33 | 16,00 | 25,00 | 21,63 | 2,342 |
| Sistem Pengendalian Internal (X_2) | 33 | 34,00 | 50,00 | 42,18 | 4,096 |
| Moralitas (X_3) | 33 | 24,00 | 30,00 | 27,21 | 2,394 |
| Kompetensi Aparatur (X_4) | 33 | 39,00 | 50,00 | 42,33 | 2,780 |
| Pencegahan <i>Fraud</i> (Y) | 33 | 36,00 | 50,00 | 42,00 | 3,840 |

Valid N (listwise) 33

Sumber: Data primer diolah, 2023

Uji Kualitas Data

Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap valid dan reliabel. Validitas terkonfirmasi dengan nilai signifikansi $r_{tabel} < r_{hitung}$ yaitu $0,000 < 0,005$, sementara reliabilitas diperkuat dengan nilai α Cronbach yang melebihi 0,70 untuk seluruh variabel.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp.Sig* sebesar 0,200, yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data variabel memiliki distribusi normal, karena nilai tersebut melebihi taraf signifikansi yang ditentukan. Informasi lebih lanjut mengenai uji normalitas dapat ditemukan pada Tabel 3. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang memberikan hasil nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 yaitu berkisar 1,840 – 3,873, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Ghozali (2019) menyatakan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas jika tidak terlihat pola yang jelas seperti gelombang yang melebar kemudian menyempit pada *scatterplot*, dan jika titik-titik tersebar di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu y (Ghozali, 2019). Dari hasil *scatterplot* yang sudah diuji sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa titik-titiknya tidak menunjukkan pola yang teratur, dan mereka tersebar di kedua sisi nilai 0 pada sumbu y. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov*

| | Unstandardize d Residual | Standar | Keterangan |
|-----------------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| Asymp.Sig. (2-tailed) | 0,200 | > 0,05 | Data terdistribusi normal |

Sumber: Data primer diolah, 2023

Uji Hipotesis

Hasil uji regresi linear berganda berdasarkan data hasil penelitian dan *output* program SPSS 29 sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Variabel | Koefisien Regresi | t_{hitung} | F_{hitung} | Sig. | Keterangan |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------|------------------------------|
| Konstanta | -1,603 | -0,226 | | 0,823 | |
| Kesesuaian Kompensasi (X_1) | 0,415 | 1,427 | 11,396 | 0,165 | Tidak berpengaruh terhadap Y |

| | | | | |
|--|---------|--------|-------|------------------------------|
| Sistem Pengendalian Internal (X_2) | 0,100 | 0,464 | 0,646 | Tidak berpengaruh terhadap Y |
| Moralitas (X_3) | -0,167 | -0,675 | 0,517 | Tidak berpengaruh terhadap Y |
| Kompetensi Aparatur (X_4) | 0,826 | 3,387 | 0,002 | Berpengaruh terhadap Y |
| t_{tabel} | = 2,048 | | | |
| F_{tabel} | = 2,947 | | | |
| R | = 0,787 | | | |
| R Square | = 0,619 | | | |
| Adjusted R Square | = 0,565 | | | |

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4 diatas, hasil uji regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

$$\text{Pencegahan Fraud} = -1,603X_1 + 0,415X_2 + 0,100X_3 - 0,167X_4 + 0,826Y + e$$

Untuk mengevaluasi pengaruh individu masing-masing variabel bebas terhadap pencegahan *fraud* (Y), uji t digunakan dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$. Jika nilai t untuk setiap faktor lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, maka variabel bebas tersebut dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Y). Nilai t tabel untuk derajat kebebasan (df) = (n-1-k) adalah 2,048, dengan df sebagai derajat kebebasan dan k sebagai jumlah variabel. Sehingga, nilai t tabel dihitung dengan menggunakan df = (33-1-4) = 28. Berdasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa variabel kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, dan moralitas memiliki nilai thitung < nilai ttabel dan nilai signifikansi yang lebih tinggi dari taraf signifikansi, yang berarti bahwa ketiga variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun, variabel kompetensi aparatur memiliki nilai t hitung > nilai t tabel dan nilai signifikansi yang lebih rendah dari taraf signifikansi, menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Selain melakukan uji t, penelitian ini juga menguji hipotesis untuk koefisien determinasi berganda (R^2). Dari hasil uji koefisien determinan pada Tabel 4, ditemukan bahwa nilai koefisien korelasi adalah 0,787, menghasilkan koefisien determinan (R^2) sebesar 0,619. Ini mengindikasikan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen mencapai 61,9%, sementara 38,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Uji hipotesis selanjutnya menggunakan uji F untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai aktual (*goodness of fit*). Berdasarkan Tabel 4, nilai signifikansi (sig.) adalah 0,000, dengan tingkat probabilitas 0,05, yang berarti

0,000 < 0,05, dan nilai t_{hitung} < t_{tabel} , yaitu $11,396 > 2,947$. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, semua variabel independen memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen.

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang telah dijelaskan sebelumnya, kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Meskipun diperkirakan bahwa kompensasi yang memadai dapat menjadi faktor pencegah terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi juga dapat memiliki dampak negatif terhadap upaya pencegahan kecurangan. Berdasarkan *Fraud Diamond Theory*, tekanan yang diprosikan dengan kesesuaian kompensasi tidak memberikan efek terhadap pencegahan *fraud* yang artinya ada variabel lain yang dapat diprosikan dengan tekanan yang memungkinkan upaya pencegahan *fraud*, seperti akuntabilitas. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Irwansyah & Syufriadi (2019), yang menegaskan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kesesuaian kompensasi dan kecenderungan kecurangan. Dengan kata lain, pemberian kompensasi yang sesuai tidak selalu menjamin pencegahan kecurangan dalam suatu organisasi. Dari akumulasi skor jawaban responden pada kuesioner, kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* karena dipicu oleh keterlambatan pembayaran gaji.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, artinya sistem pengendalian yang baik belum tentu bisa mencegah terjadinya kecurangan sehingga penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Huljanah (2019). Dari akumulasi skor jawaban responden pada kuesioner, hal tersebut terjadi dikarenakan belum terlaksananya pemisahan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab secara tepat. Berdasarkan *Fraud Diamond Theory*, peluang yang diprosikan dengan sistem pengendalian internal tidak memberikan efek terhadap pencegahan *fraud* yang artinya ada variabel lain yang dapat diprosikan dengan peluang (*opportunity*) yang memungkinkan upaya pencegahan *fraud*, seperti penegakan hukum, dimana peluang terjadinya *fraud* akibat kelemahan didalam sistem penegakan hukum dapat dimanfaatkan untuk berbuat kecurangan.

Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang telah dijelaskan sebelumnya, moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Dewi et al. (2017) yang mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya moralitas tidak memberikan

pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan. Seorang individu, meskipun memandang dirinya memiliki moralitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin terlibat dalam kecurangan akibat tekanan dari orang lain atau situasi tertentu. Oleh karena itu, tingkat moralitas yang tinggi atau rendah tidak secara langsung menentukan apakah individu tersebut akan berperilaku baik atau mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasionalisasi dalam *Fraud Diamond Theory* dapat diproksikan menjadi variabel lain karena meskipun individu mungkin memiliki nilai moral yang tinggi, tekanan atau alasan eksternal dapat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan mereka seperti budaya organisasi. Budaya organisasi yang mendukung atau menoleransi tindakan yang tidak etis dapat memengaruhi rasionalisasi individu terhadap perilaku *fraud*.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang telah dijelaskan sebelumnya, kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ini mendapatkan dukungan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadli (2021), yang menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur memengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga sesuai dengan konsep *Fraud Diamond Theory* sebagai upaya pencegahan kecurangan, dimana *capability* atau kapabilitas adalah kemampuan yang berkaitan dengan posisi, kecerdasan atau kreativitas, dan kemampuan persuasi. Ketiga elemen ini sangat menentukan mampu tidaknya seseorang melakukan tindakan *fraud*. Hal ini berarti semakin baik kompetensi aparatur desa, maka akan semakin baik pula pencegahan kecurangan dana desa. Kompetensi tidak hanya mencakup aspek teknis dalam menjalankan tugas, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip etika, integritas, dan kepatuhan. Aparatur yang kompeten dapat membantu organisasi melalui pemahaman mendalam terhadap sistem, proses, dan kebijakan, serta memiliki keterampilan untuk mendeteksi dan mengatasi potensi risiko *fraud*. Selain itu, mereka dapat berperan sebagai agen perubahan dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung integritas dan kepatuhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pertama, kesesuaian kompensasi tidak memiliki dampak yang signifikan, menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai belum tentu menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya kecurangan. Kedua, sistem pengendalian internal yang baik juga tidak secara langsung terkait dengan tingkat pencegahan kecurangan, dengan keterlambatan pemisahan wewenang dan tanggung jawab sebagai kendala utama. Ketiga, moralitas individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud*, menunjukkan

bahwa tinggi atau rendahnya moralitas tidak secara langsung memengaruhi perilaku pencegahan kecurangan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil ini memberikan wawasan bahwa upaya pencegahan kecurangan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparat desa. Meskipun demikian, uji simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap Pencegahan *Fraud*. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Desa lebih memfokuskan perhatian pada pengembangan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan program pengembangan sumber daya manusia. Perbaikan dalam sistem pengendalian internal, peningkatan fokus pada etika dan moralitas, serta pengelolaan kompensasi yang lebih efektif tetap menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat pengelolaan dana desa.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kembali variabel kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, dan moralitas dengan mempertimbangkan penggunaan instrumen yang lain. Selain itu, perlu diperhatikan kontekstualisasi variabel kesesuaian kompensasi dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Analisis lebih mendalam terhadap elemen spesifik dalam sistem pengendalian internal juga diperlukan untuk mengidentifikasi area perbaikan. Penelitian dapat mengeksplorasi faktor kontekstual yang memoderasi hubungan moralitas individu dan pencegahan *fraud*, serta memperluas pemahaman variabel lain seperti akuntabilitas, penegakan hukum, dan budaya organisasi. Studi komparatif di berbagai lokasi juga relevan untuk mendukung pengembangan strategi pencegahan kecurangan yang lebih efektif di tingkat pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Antara News. (2023, 19 Juni). Dua terdakwa kasus korupsi BPNT Mukomuko divonis 16 tahun penjara. <https://www.antarane.ws.com/berita/3595572/dua-terdakwa-kasus-korupsi-bpnt-mukomuko-divonis-16-tahun-penjara> diakses pada 1 Oktober 2023 pukul 13.27

Antara News. (2022, 19 Juli). Kerugian Akibat Korupsi Dana Desa Pasar Ipuh Capai 327 Juta. Diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/3005165/kerugian-akibat-korupsi-dana-desa-pasar-ipuh-capai-rp327-juta#mobile-nav> diakses pada 1 Oktober 2023

Antara News. (2022, 6 September). Kejari Mukomuko memeriksa pihak terkait korupsi dana desa. <https://www.antarane.ws.com/berita/3101985/kejari-mukomuko-memeriksa-pihak-terkait-korupsi-dana-desa> diakses pada 1 Oktober 2023 pukul 13.00

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2010. *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Austin, TX: ACFE.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022, 2 Februari). Penyaluran BLT DD jadi temuan BPK. <https://bengkulu.bpk.go.id/penyaluran-blt-dd-jadi-temuan-bpk/> diakses pada 1 Oktober 2023 pukul 12.37
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. Nama Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mukomuko, 2017. Diakses dari <https://mukomukokab.bps.go.id/> diakses pada 20 Oktober 2023 pukul 11.45.
- Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti S, D. (2019). Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61-76. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76>
- Dewi, Putu Feny Kharisma, G. A. Y. dan, & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal Kas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Studi Pada Desa di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Fachruzzaman, F., Permatasari, A., & Abdullah, A. (2021). Effect of Effectiveness of Operational Audit, Internal Control and Professionalism of Financial Management Apparatus on the Quality of Financial Statements at the BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu. *Journal of Indonesian Management (JIM)*, 1(3), 386-393. <https://doi.org/10.53697/jim.v1i3.233>
- Fadli, S.M. 2021. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan pada Pemerintahan Desa dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Desa Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyu). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halimatusyadiah, H., & Nugraha, A. (2019). Identifikasi Tingkat Kecurangan Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 35-52. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.2.35-52>
- Halimatusyadiah, H., & Robani, M. H. (2021). The Effect Of Internal Control System, Information Asymmetry, Suitability Of Compensation And Organization's Ethical Culture On Accounting Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 175-188. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.175-188>

- Huljanah, Dwi Nur. 2019. *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa*. Tugas Akhir. Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Indonesia Corruption Watch. (2018). *Outlook Dana Desa*.
- Irwansyah, I., & Syufriadi, B. (2019). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 89-100. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.2.89-100>
- Laksmi, Putu Santi Putri dan I Ketut Sujana. 2019. "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa". Universitas Udayana : E-jurnal Akuntansi Volume 26.3 Maret (2019) : 2155-2181.
- Molida, R., & Chariri, A. (2011). Pengaruh Financial Stability, Personal Financial Need Dan Ineffective Monitoring Pada Financial Statement *Fraud* Dalam Perspektif *Fraud Triangle*. Universitas Diponegoro.
- Natalia, L., & Coryanata, I. (2019). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Perusahaan Pembiayaan Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 8(3), 135-144. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.3.135-144>
- Puspasari, N. (2015). Fraud theory evolution and its relevance to fraud prevention in the village government in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(2), 177-188.
- Radar Bengkulu. (2022, 23 Oktober). 6 desa di Mukomuko belum setor pajak dana desa 2022 sama sekali. <https://radarbengkulu.disway.id/read/654657/6-des-a-di-mukomuko-belum-setor-pajak-dana-desa-2022-sama-sekali> diakses pada 1 Oktober 2023 pukul 12.40
- Rahimah, Laila Nur and Murni, Yetty and Lysandra, Shanti. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6 (12). pp. 139-154. ISSN 2088-6969
- Rahmawati, E., Rasidah, R., & Yuliastina, M. (2020). Determinan *Fraud Prevention* pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 129-152.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 4 (2024) 3826-3841 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i4.1058

Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 2(031), 12-13. <https://doi.org/10.1001/jama.1994.03520170077040>

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The *fraud* diamond: Considering the four elements of *fraud*. *The CPA Journal*, 74(12), 38.